

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik yang sangat pesat di Indonesia, maka saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan milik negara atau daerah, lembaga-lembaga pemerintah, dan berbagai organisasi sektor publik lainnya. Terdapat tuntutan umum yang lebih besar dalam pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2004:1).

Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik dan memenuhi kesejahteraan di berbagai kehidupan. Pemerintah adalah suatu entitas publik yang harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya berupa laporan keuangan. Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan cara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Kiranayanti dan Ni Made, 2016).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) terdapat lima jenis pendapat akuntan, antara lain: pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pangacualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Laporan keuangan adalah posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas dengan mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap publik dan juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan sebuah keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, oleh karena itu informasi keuangan yang disajikan harus mempunyai nilai supaya informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan yang mempunyai nilai dan dapat bermanfaat bagi penggunanya berarti laporan keuangan tersebut berkualitas. Salah satu aspek penting yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Widari dan Sutrisno, 2017).

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah yang dikatakan berkualitas jika informasi tersebut harus memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan antara lain relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*undrstandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*). Laporan keuangan yang berkualitas penting karena dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang dengan adanya kekeliruan dan penyimpangan dalam bidang keuangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum (Wungow, dkk, 2015).

Senin (17/12/2018) bertempat di Gedung BPK Jateng Semarang berlangsung penyerahan laporan hasil pemeriksaan efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Kepala BPK Jateng Hery Subowo menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Kudus H. M. Tamzil dan Ketua DPRD Kudus Ahmad Yusuf Roni. Hery mengingatkan kembali bahwa dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk membangun memberdayakan masyarakat antara lain untuk meningkatkan layanan publik, mengentaskan kemiskinan, membangkitkan perekonomian desa. Naiknya alokasi dana desa tiap tahunnya dari pemerintah pusat, maka dibutuhkan suatu sistem tata kelola keuangan untuk mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut didasari oleh pengalamannya melakukan pemeriksaan dana desa ditingkat desa sering menemui permasalahan yang sama, yaitu rendahnya kualitas tata kelola keuangan. Oleh karena itu diharapkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi keuangan pemerintah desa (Kudusnews, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang pertama adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern merupakan suatu proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak kepada organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi tertentu. Komitmen organisasi adalah suatu dorongan dalam individu untuk berbuat sesuatu supaya dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu (Arif, 2017).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat mampu membantu aparatur pemerintah daerah dalam menyelesaikan tugasnya terutama dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan penyusunan anggaran (Wungow, dkk, 2015).

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan sasaran dan tujuan yang kemudian membuat suatu rencana kegiatan

untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut (Defitri, 2018). Dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel (Megawati, dkk, 2015).

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah faktor utama untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Teknologi Informasi merupakan teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat (Supriyanto, 2007:6). Suatu teknologi informasi terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan manajemen data. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam suatu organisasi dalam hal pelaporan keuangan sehingga dapat lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan (Widjajanto, 2001:89).

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Widari dan Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian dari Mokoginta, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Muzahid (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Wungow, dkk (2015) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Widari dan Sutrisno (2017). Ada dua perbedaan dari penelitian ini, pertama variabel yang digunakan Widari dan Sutrisno (2017) yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan pembeda dari penelitian ini yaitu dengan menambahkan tiga variabel independen yang pertama tingkat pendidikan karena dengan pendidikan formal yang memadai maka staf bagian keuangan/akuntansi akan mudah mengerti dan memahami dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Muzahid, 2014). Kedua yaitu pengelolaan keuangan daerah, karena variabel ini merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan dengan aturan yang jelas sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi, karena variabel ini akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas (Maksyur, 2015).

Alasan penambahan variabel tersebut karena pada penelitian yang dilakukan Widari dan Sutrisno (2017) disarankan agar meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan kedua, objek penelitian Widari dan Sutrisno (2017) dilakukan pada DPPKAD, SETDA dan KOMINFO Kota Sukabumi, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Kudus. Perbedaan ketiga, tahun penelitian Widari dan Sutrisno (2017)

dilakukan pada tahun 2017, sedangkan tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan dari hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, Tingkat Pendidikan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat terfokus, maka ruang lingkup dari penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
- b. Variabel dependen dalam penelitian adalah kualitas laporan keuangan keuangan daerah. Sedangkan variabel independen adalah sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.3 Perumusan Masalah

Naiknya alokasi dana desa tiap tahunnya dari pemerintah pusat maka dibutuhkan suatu sistem tata kelola keuangan untuk mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut terdapat permasalahan yaitu rendahnya kualitas tata kelola keuangan, oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan tidak andal dan akurat sehingga laporan keuangan tersebut tidak berkualitas.

Peneliti akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Faktor-faktor berikut antara lain sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini akan membuktikan apakah sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor tersebut yang meliputi sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis tentang kualitas laporan keuangan daerah di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang kualitas laporan keuangan daerah.

